



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 31TAHUN 2024  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan

- Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 219).
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 227);
  37. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

9. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula Rp836.763.755.611,00 bertambah sebesar Rp26.320.444.118,00 sehingga menjadi Rp861.084.199.729,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp. 788.601.688.649,00	
2. Bertambah	<u>Rp 34.551.075.534,00</u>	
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 823.152.764.183,00
b. belanja Daerah		
1. Semula	Rp 834.763.755.611,00	
2. Bertambah	<u>Rp 26.320.444.118,00</u>	
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan		Rp 861.084.199.729,00
c. pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp 48.162.066.962,00	
b) Berkurang	<u>Rp (8.230.631.416,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 39.931.435.546,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp 2.000.000.000,00	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 2.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 37.931.435.546,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARDIANSYAH, SH  
NIP. 197808272010011011





**KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>43.055.363.750,00</b>	<b>56.953.968.820,00</b>	<b>13.898.605.070,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	6.712.813.746,00	8.130.934.881,00	1.418.121.135,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	76.403.266,00	115.756.012,00	39.352.746,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	76.403.266,00	115.756.012,00	39.352.746,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	76.403.266,00	115.756.012,00	39.352.746,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.401.664.941,00	1.760.000.000,00	358.335.059,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.401.664.941,00	1.760.000.000,00	358.335.059,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.401.664.941,00	1.760.000.000,00	358.335.059,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.594.834,00	22.409.782,00	11.814.948,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	10.594.834,00	22.409.782,00	11.814.948,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	10.594.834,00	22.409.782,00	11.814.948,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	198.354.536,00	281.943.706,00	83.589.170,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	198.354.536,00	281.943.706,00	83.589.170,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	198.354.536,00	281.943.706,00	83.589.170,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.374.970.788,00	3.300.000.000,00	925.029.212,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.374.970.788,00	3.300.000.000,00	925.029.212,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.374.970.788,00	3.300.000.000,00	925.029.212,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	175.760.000,00	175.760.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	175.760.000,00	175.760.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	175.760.000,00	175.760.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.031.685.077,00	1.031.685.077,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.031.685.077,00	1.031.685.077,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.031.685.077,00	1.031.685.077,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	770.540.398,00	770.540.398,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	770.540.398,00	770.540.398,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	770.540.398,00	770.540.398,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	662.839.906,00	662.839.906,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	662.839.906,00	662.839.906,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	662.839.906,00	662.839.906,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.344.001.431,00	41.785.496.327,00	32.441.494.896,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	40.112.033,00	32.390.206.929,00	32.350.094.896,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	32.350.094.896,00	32.350.094.896,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	13.559.982.216,00	13.559.982.216,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	18.790.112.680,00	18.790.112.680,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	39.112.033,00	39.112.033,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	7.144.875,00	7.144.875,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	307.969,00	307.969,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	31.659.189,00	31.659.189,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.203.889.398,00	9.295.289.398,00	91.400.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.641.889.398,00	8.641.889.398,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.641.889.398,00	8.641.889.398,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	0,00	57.512.000,00	57.512.000,00
4.1.02.02.10.0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	0,00	14.488.000,00	14.488.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.170.858.966,00	3.367.968.955,00	197.109.989,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.170.858.966,00	3.367.968.955,00	197.109.989,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.170.858.966,00	3.367.968.955,00	197.109.989,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.170.858.966,00	3.367.968.955,00	197.109.989,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.827.689.607,00	3.669.568.657,00	-20.158.120.950,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	645.893.300,00	645.893.300,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	645.893.300,00	645.893.300,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	645.893.300,00	645.893.300,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	83.875.000,00	233.875.000,00	150.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	83.875.000,00	233.875.000,00	150.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	83.875.000,00	233.875.000,00	150.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.901.129.647,00	1.901.129.647,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.901.129.647,00	1.901.129.647,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.901.129.647,00	1.901.129.647,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000,00	600.890.000,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000,00	600.890.000,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000,00	600.890.000,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00
4.1.04.13.02.0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	162.060.710,00	162.060.710,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	162.060.710,00	162.060.710,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	162.060.710,00	162.060.710,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.116.074.960,00	0,00	-21.116.074.960,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.116.074.960,00	0,00	-21.116.074.960,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.116.074.960,00	0,00	-21.116.074.960,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>738.548.349.851,00</b>	<b>765.844.727.571,00</b>	<b>27.296.377.720,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	693.953.540.000,00	717.841.777.600,00	23.888.237.600,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	643.265.047.000,00	667.153.284.600,00	23.888.237.600,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.753.527.000,00	43.522.472.000,00	18.768.945.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.762.634.000,00	7.762.634.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.925.476.000,00	3.925.476.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	22.287.000,00	22.287.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.522.555.000,00	16.892.246.000,00	9.369.691.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	511.920.000,00	511.920.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.030.942.000,00	5.030.942.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	9.376.967.000,00	9.376.967.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	486.304.139.000,00	491.423.431.600,00	5.119.292.600,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	363.899.477.000,00	369.018.769.600,00	5.119.292.600,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.969.324.000,00	21.969.324.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	57.931.912.000,00	57.931.912.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	30.036.115.000,00	30.036.115.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	12.467.311.000,00	12.467.311.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.707.182.000,00	55.707.182.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	238.524.000,00	238.524.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.571.942.000,00	5.571.942.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.768.179.000,00	2.768.179.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.286.815.000,00	3.286.815.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.570.961.000,00	1.570.961.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.002.000.000,00	2.002.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.913.364.000,00	8.913.364.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.823.789.000,00	10.823.789.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.750.877.000,00	5.750.877.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.280.731.000,00	13.280.731.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	76.500.199.000,00	76.500.199.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.585.070.000,00	20.585.070.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.314.315.000,00	31.314.315.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.321.750.000,00	1.321.750.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.832.996.000,00	2.832.996.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.715.490.000,00	1.715.490.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	287.700.000,00	287.700.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.046.549.000,00	14.046.549.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	392.886.000,00	392.886.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.427.443.000,00	2.427.443.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	43.390.003.000,00	43.390.003.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	43.390.003.000,00	43.390.003.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	43.390.003.000,00	43.390.003.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.298.490.000,00	7.298.490.000,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.298.490.000,00	7.298.490.000,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.298.490.000,00	7.298.490.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.594.809.851,00	48.002.949.971,00	3.408.140.120,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.594.809.851,00	46.802.949.971,00	2.208.140.120,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.594.809.851,00	46.802.949.971,00	2.208.140.120,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.419.872.643,00	5.419.872.643,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.731.508.702,00	5.731.508.702,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.775.458.568,00	24.775.458.568,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	344.787.474,00	344.787.474,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.323.182.464,00	10.531.322.584,00	2.208.140.120,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.997.975.048,00</b>	<b>354.067.792,00</b>	<b>-6.643.907.256,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.997.975.048,00	354.067.792,00	-6.643.907.256,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.997.975.048,00	354.067.792,00	-6.643.907.256,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.997.975.048,00	354.067.792,00	-6.643.907.256,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.997.975.048,00	354.067.792,00	-6.643.907.256,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>788.601.688.649,00</b>	<b>823.152.764.183,00</b>	<b>34.551.075.534,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>639.238.639.337,00</b>	<b>654.133.890.901,07</b>	<b>14.895.251.564,07</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	310.379.257.433,00	317.240.894.416,46	6.861.636.983,46
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	192.823.702.878,00	196.305.368.885,00	3.481.666.007,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	141.677.103.365,00	145.610.198.789,00	3.933.095.424,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	117.637.416.617,00	114.986.023.354,00	-2.651.393.263,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.039.686.748,00	30.624.175.435,00	6.584.488.687,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.077.584.683,00	14.086.216.156,00	8.631.473,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.966.118.745,00	11.643.281.241,00	-322.837.504,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.111.465.938,00	2.442.934.915,00	331.468.977,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.448.631.885,00	3.110.350.710,00	-338.281.175,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.448.631.885,00	3.110.350.710,00	-338.281.175,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.643.365.262,00	13.210.949.813,00	567.584.551,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.139.615.570,00	9.789.882.484,00	-349.733.086,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.503.749.692,00	3.421.067.329,00	917.317.637,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	989.871.220,00	916.708.312,00	-73.162.908,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	961.685.020,00	907.176.312,00	-54.508.708,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.186.200,00	9.532.000,00	-18.654.200,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.012.029.128,00	8.626.122.451,00	-385.906.677,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.420.823.017,00	6.805.884.616,00	-614.938.401,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.591.206.111,00	1.820.237.835,00	229.031.724,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	64.160.277,00	121.053.320,00	56.893.043,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62.160.277,00	121.053.320,00	58.893.043,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.337.229,00	3.852.595,00	-4.484.634,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.097.094,00	3.273.572,00	-4.823.522,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	240.135,00	579.023,00	338.888,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.532.610.475,00	9.328.933.546,00	-203.676.929,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.274.781.743,00	7.639.668.880,00	-635.112.863,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.257.828.732,00	1.689.264.666,00	431.435.934,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	358.932.068,00	333.059.001,00	-25.873.067,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	297.566.083,00	260.230.450,00	-37.335.633,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61.365.985,00	72.828.551,00	11.462.566,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.011.077.286,00	957.924.192,00	-53.153.094,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	842.668.003,00	753.199.146,00	-89.468.857,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	168.409.283,00	204.725.046,00	36.315.763,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.029.651.348,00	59.418.992.356,00	389.341.008,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	56.035.706.025,00	56.776.195.535,00	740.489.510,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.391.256.569,00	49.978.077.535,00	586.820.966,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.644.449.456,00	6.798.118.000,00	153.668.544,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	783.876.204,00	690.764.439,00	-93.111.765,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	354.876.204,00	373.364.439,00	18.488.235,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	429.000.000,00	317.400.000,00	-111.600.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.786.467.788,00	1.531.389.071,00	-255.078.717,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.786.467.788,00	1.531.389.071,00	-255.078.717,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	194.280.148,00	197.220.325,00	2.940.177,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	194.280.148,00	197.220.325,00	2.940.177,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	229.321.183,00	223.422.986,00	-5.898.197,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	229.321.183,00	223.422.986,00	-5.898.197,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.985.624.724,00	47.795.316.392,46	5.809.691.668,46
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	410.000.000,00	505.135.000,00	95.135.000,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	95.135.000,00	95.135.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	432.644.470,00	1.166.723.728,46	734.079.258,46
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	904.754.258,46	904.754.258,46
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	432.144.470,00	261.469.470,00	-170.675.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	30.851.541.000,00	36.176.050.860,00	5.324.509.860,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	30.851.541.000,00	36.176.050.860,00	5.324.509.860,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.548.212.000,00	2.571.914.400,00	23.702.400,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.548.212.000,00	2.571.914.400,00	23.702.400,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	660.875.000,00	929.944.950,00	269.069.950,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	660.875.000,00	929.944.950,00	269.069.950,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.261.348.454,00	539.992.454,00	-721.356.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.261.348.454,00	539.992.454,00	-721.356.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.355.870.800,00	4.349.942.000,00	-5.928.800,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.093.750.800,00	3.018.750.000,00	-75.000.800,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.178.120.000,00	1.278.692.000,00	100.572.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	84.000.000,00	52.500.000,00	-31.500.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	56.700.000,00	147.180.000,00	90.480.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	24.000.000,00	114.480.000,00	90.480.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	462.774.000,00	462.774.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	462.774.000,00	462.774.000,00	0,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	284.784.000,00	284.784.000,00	0,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	284.784.000,00	284.784.000,00	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	660.875.000,00	660.875.000,00	0,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	660.875.000,00	660.875.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.821.223.770,00	12.884.894.225,00	-936.329.545,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000,00	546.735.000,00	-95.025.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000,00	546.735.000,00	-95.025.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400,00	57.989.400,00	-27.533.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400,00	57.989.400,00	-27.533.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800,00	67.893.000,00	-9.571.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800,00	67.893.000,00	-9.571.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	41.128.500,00	-7.003.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	41.128.500,00	-7.003.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000,00	792.765.750,00	-137.776.250,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000,00	792.765.750,00	-137.776.250,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700,00	60.230.100,00	-8.464.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700,00	60.230.100,00	-8.464.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900,00	41.320.650,00	-10.439.250,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900,00	41.320.650,00	-10.439.250,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.087.000.000,00	-63.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.087.000.000,00	-63.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	525.000.000,00	-262.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	525.000.000,00	-262.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970,00	260.989.633,00	-49.703.337,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970,00	260.989.633,00	-49.703.337,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.761.000.000,00	3.538.642.192,00	-222.357.808,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	203.000.000,00	61.597.120,00	-141.402.880,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00	1.136.268,00	-1.863.732,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00	3.408.804,00	-2.591.196,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.549.000.000,00	3.472.500.000,00	-76.500.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000,00	3.693.000.000,00	-82.435.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.775.435.000,00	3.693.000.000,00	-82.435.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000,00	172.200.000,00	39.480.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000,00	172.200.000,00	39.480.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.884.540,00	56.700.000,00	-106.184.540,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	-54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	-54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	0,00	-3.528.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	0,00	-3.528.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.736.000,00	56.700.000,00	-36.036.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	92.736.000,00	56.700.000,00	-36.036.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	0,00	-5.069.400,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00	0,00	-5.069.400,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	693.700,00	0,00	-693.700,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	693.700,00	0,00	-693.700,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	0,00	-1.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	0,00	-1.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00	0,00	-6.256.320,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00	0,00	-6.256.320,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	922.624.000,00	364.800.000,00	-557.824.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000,00	184.800.000,00	-17.824.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000,00	184.800.000,00	-17.824.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	720.000.000,00	180.000.000,00	-540.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	720.000.000,00	180.000.000,00	-540.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.633.546.173,00	414.822.558,00	-1.218.723.615,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.633.546.173,00	414.822.558,00	-1.218.723.615,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.633.546.173,00	414.822.558,00	-1.218.723.615,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.171.984.270,00	310.757.343.700,61	8.585.359.430,61
5.1.02.01	Belanja Barang	57.468.763.813,00	55.535.884.427,00	-1.932.879.386,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.468.763.813,00	55.311.077.302,00	-2.157.686.511,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.479.259.029,00	526.157.557,00	-953.101.472,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.744.264.780,00	5.620.388.240,00	876.123.460,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	361.361.600,00	274.578.500,00	-86.783.100,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	721.859.000,00	552.075.000,00	-169.784.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.698.002.846,00	4.528.105.815,00	830.102.969,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	742.676.150,00	666.317.910,00	-76.358.240,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	843.519.617,00	905.170.001,00	61.650.384,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.715.414.259,00	1.792.251.767,00	76.837.508,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.119.508.499,00	5.593.072.537,00	-1.526.435.962,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	272.927.000,00	332.568.000,00	59.641.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.907.658.100,00	1.741.385.600,00	-1.166.272.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.092.356.343,00	1.144.888.843,00	52.532.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	836.871.250,00	984.175.902,00	147.304.652,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	145.457.500,00	226.052.000,00	80.594.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	124.970.000,00	151.823.000,00	26.853.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.244.065.220,00	1.262.423.620,00	18.358.400,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.019.284.000,00	3.160.050.425,00	140.766.425,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.009.466.220,00	650.013.355,00	-359.452.865,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.585.565.250,00	3.942.415.930,00	-1.643.149.320,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.522.860.000,00	1.566.225.000,00	43.365.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	839.280.000,00	704.534.600,00	-134.745.400,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	655.552.230,00	1.301.206.230,00	645.654.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.938.768.570,00	12.456.448.960,00	517.680.390,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	633.100.000,00	613.740.000,00	-19.360.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.571.310.000,00	2.828.394.000,00	257.084.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	69.000.000,00	153.000.000,00	84.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	34.360.000,00	113.360.000,00	79.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	119.604.950,00	139.659.610,00	20.054.660,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	517.977.400,00	489.047.900,00	-28.929.500,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	40.760.000,00	91.760.000,00	51.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	44.600.000,00	49.600.000,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	286.925.000,00	2.125.000,00	-284.800.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	192.600.000,00	296.028.000,00	103.428.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	85.760.000,00	77.120.000,00	-8.640.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	214.058.000,00	337.153.000,00	123.095.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	37.761.000,00	37.761.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	224.807.125,00	224.807.125,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	224.807.125,00	224.807.125,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	142.097.903.244,00	143.589.361.653,54	1.491.458.409,54
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	74.897.480.450,00	63.938.468.215,00	-10.959.012.235,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	383.100.000,00	385.125.000,00	2.025.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.556.499.000,00	2.599.229.000,00	42.730.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.829.478.000,00	4.291.818.000,00	-1.537.660.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.500.000,00	78.000.000,00	70.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.870.874.000,00	1.791.948.310,00	-78.925.690,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	266.100.000,00	258.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	97.630.000,00	101.830.000,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	189.700.000,00	70.900.000,00	-118.800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	949.500.000,00	843.000.000,00	-106.500.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.290.593.500,00	5.977.835.500,00	-1.312.758.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.380.806.000,00	9.206.846.000,00	-2.173.960.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	548.300.000,00	689.025.000,00	140.725.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	246.325.000,00	224.175.000,00	-22.150.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	773.700.000,00	807.050.000,00	33.350.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.621.752.000,00	22.512.749.250,00	-4.109.002.750,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	575.000.000,00	1.011.700.000,00	436.700.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	55.900.000,00	102.250.000,00	46.350.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	449.122.125,00	410.122.125,00	-39.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	42.487.000,00	330.803.500,00	288.316.500,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	935.680.000,00	919.400.000,00	-16.280.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	427.695.000,00	391.295.000,00	-36.400.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	62.031.000,00	62.031.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	128.771.000,00	143.021.000,00	14.250.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	559.287.903,00	109.949.170,00	-449.338.733,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.712.264.447,00	5.314.782.877,00	-1.397.481.570,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	757.790.000,00	750.890.000,00	-6.900.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.634.636.475,00	1.854.210.153,00	-780.426.322,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	43.302.000,00	48.440.000,00	5.138.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	295.500.000,00	254.845.800,00	-40.654.200,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.506.587.000,00	2.277.596.530,00	-228.990.470,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.298.040.782,00	23.582.914.442,00	284.873.660,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	600.000.000,00	734.335.880,00	134.335.880,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.382.600.000,00	20.382.600.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.059.744.669,00	2.151.748.872,00	92.004.203,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	108.833.559,00	143.010.863,00	34.177.304,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	146.862.554,00	171.218.827,00	24.356.273,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.169.749.900,00	5.396.871.798,00	-772.878.102,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.221.199.900,00	1.982.234.450,00	-238.965.450,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.630.050.000,00	3.137.887.348,00	-492.162.652,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	211.000.000,00	156.250.000,00	-54.750.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	107.500.000,00	117.500.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	923.870.000,00	796.870.000,00	-127.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	923.870.000,00	796.870.000,00	-127.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.191.630.000,00	8.496.554.729,00	2.304.924.729,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	196.400.000,00	98.000.000,00	-98.400.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	849.900.000,00	1.506.796.000,00	656.896.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	10.798.920,00	10.798.920,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	234.000.000,00	32.000.000,00	-202.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	113.550.000,00	121.550.000,00	8.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	4.780.000,00	78.430.000,00	73.650.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.125.400.000,00	1.620.879.000,00	495.479.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	911.650.000,00	991.472.904,00	79.822.904,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	109.000.000,00	115.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	395.000.000,00	411.000.000,00	16.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	247.000.000,00	234.000.000,00	-13.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	48.750.000,00	373.349.280,00	324.599.280,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	832.500.000,00	1.290.130.000,00	457.630.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	873.700.000,00	1.219.148.625,00	345.448.625,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	50.000.000,00	194.000.000,00	144.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	691.000.000,00	1.521.000.000,00	830.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	641.000.000,00	791.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	585.000.000,00	585.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	28.357.186.112,00	38.666.769.728,00	10.309.583.616,00
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	0,00	91.450.000,00	91.450.000,00
5.1.02.02.10.0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	443.500.000,00	0,00	-443.500.000,00
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	27.273.686.112,00	38.575.319.728,00	11.301.633.616,00
5.1.02.02.10.0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	640.000.000,00	0,00	-640.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	988.990.000,00	888.490.000,00	-100.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	988.990.000,00	888.490.000,00	-100.500.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	579.956.000,00	301.422.741,54	-278.533.258,46

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	579.956.000,00	301.422.741,54	-278.533.258,46
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.843.714.387,00	9.657.704.566,02	-186.009.820,98
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.087.813.757,00	3.794.448.316,00	-293.365.441,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	454.081.846,00	98.800.000,00	-355.281.846,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.414.161.639,00	2.394.663.802,00	-19.497.837,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.186.720.272,00	1.255.021.489,00	68.301.217,00
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	15.400.000,00	33.513.025,00	18.113.025,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.450.000,00	12.450.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.755.900.630,00	5.863.256.250,02	107.355.620,02
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.755.900.630,00	5.863.256.250,02	107.355.620,02
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.153.473.046,00	46.401.508.315,05	3.248.035.269,05
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.153.473.046,00	46.401.508.315,05	3.248.035.269,05
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.458.467.100,00	26.788.720.196,05	4.330.253.096,05
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.695.005.946,00	19.612.788.119,00	-1.082.217.827,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.927.077.400,00	8.148.035.800,00	-779.041.600,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.352.077.400,00	7.535.335.800,00	-816.741.600,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.075.440.000,00	738.711.600,00	-336.728.400,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	7.276.637.400,00	6.439.764.200,00	-836.873.200,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	56.860.000,00	56.860.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	575.000.000,00	612.700.000,00	37.700.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	575.000.000,00	612.700.000,00	37.700.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.472.070.000,00	17.973.117.010,00	501.047.010,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.472.070.000,00	17.973.117.010,00	501.047.010,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.472.070.000,00	17.973.117.010,00	501.047.010,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.208.982.380,00	29.451.731.929,00	6.242.749.549,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.208.982.380,00	29.451.731.929,00	6.242.749.549,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.208.982.380,00	29.451.731.929,00	6.242.749.549,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.687.397.634,00	26.135.652.784,00	-551.744.850,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.040.982.234,00	25.470.982.234,00	-570.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.482.792.234,00	19.612.792.234,00	130.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.482.792.234,00	19.612.792.234,00	130.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.433.190.000,00	5.733.190.000,00	-700.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.433.190.000,00	5.733.190.000,00	-700.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00	664.670.550,00	18.255.150,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00	664.670.550,00	18.255.150,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400,00	664.670.550,00	18.255.150,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>93.759.450.200,00</b>	<b>108.003.738.648,79</b>	<b>14.244.288.448,79</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.777.230.220,00	19.359.967.881,50	1.582.737.661,50
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	79.900.000,00	0,00	-79.900.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	79.900.000,00	0,00	-79.900.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	32.400.000,00	0,00	-32.400.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	47.500.000,00	0,00	-47.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.265.204.822,00	3.107.440.822,00	-157.764.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.265.204.822,00	3.107.440.822,00	-157.764.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.101.960.822,00	3.039.760.822,00	-62.200.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	163.244.000,00	67.680.000,00	-95.564.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.463.977.000,00	727.445.100,00	-736.531.900,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.463.977.000,00	727.445.100,00	-736.531.900,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	800.000.000,00	472.500.000,00	-327.500.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	493.235.000,00	84.203.100,00	-409.031.900,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	149.242.000,00	149.242.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.768.713.360,00	1.615.520.268,00	-153.193.092,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	108.902.000,00	151.344.238,00	42.442.238,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.152.000,00	8.152.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.750.000,00	143.192.238,00	42.442.238,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.235.114.360,00	1.022.897.630,00	-212.216.730,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	169.025.000,00	139.275.000,00	-29.750.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	373.709.700,00	262.358.770,00	-111.350.930,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.570.000,00	29.930.200,00	6.360.200,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	564.301.660,00	453.298.660,00	-111.003.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.508.000,00	37.035.000,00	33.527.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	424.697.000,00	441.278.400,00	16.581.400,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	110.715.000,00	100.208.400,00	-10.506.600,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	151.625.000,00	114.970.000,00	-36.655.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	58.675.000,00	49.375.000,00	-9.300.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	16.000.000,00	128.400.000,00	112.400.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	87.682.000,00	37.125.000,00	-50.557.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	469.478.000,00	474.301.300,00	4.823.300,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	429.198.000,00	434.021.300,00	4.823.300,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	429.198.000,00	434.021.300,00	4.823.300,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.851.250.000,00	5.813.162.350,00	1.961.912.350,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.000.000.000,00	4.661.912.350,00	1.661.912.350,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	4.661.912.350,00	4.661.912.350,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	851.250.000,00	1.151.250.000,00	300.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	851.250.000,00	1.151.250.000,00	300.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.092.341.038,00	1.943.539.363,50	-148.801.674,50
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	62.963.968,50	62.963.968,50
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	56.633.968,50	56.633.968,50
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	6.330.000,00	6.330.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.092.341.038,00	1.880.575.395,00	-211.765.643,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.947.100,00	1.757.100,00	-190.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.001.675.048,00	1.799.618.955,00	-202.056.093,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	88.718.890,00	79.199.340,00	-9.519.550,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.071.000,00	58.222.000,00	54.151.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.071.000,00	58.222.000,00	54.151.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.071.000,00	8.222.000,00	4.151.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.525.000.000,00	3.031.296.300,00	-493.703.700,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.525.000.000,00	3.031.296.300,00	-493.703.700,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.525.000.000,00	3.031.296.300,00	-493.703.700,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.257.295.000,00	2.549.040.378,00	1.291.745.378,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.257.295.000,00	2.549.040.378,00	1.291.745.378,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.257.295.000,00	2.549.040.378,00	1.291.745.378,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.895.203.179,00	19.092.418.188,29	-1.802.784.990,71
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.625.803.179,00	18.817.518.188,29	-1.808.284.990,71
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.476.253.179,00	18.667.968.188,29	-1.808.284.990,71
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.476.253.179,00	18.667.968.188,29	-1.808.284.990,71
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	149.550.000,00	149.550.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	149.550.000,00	149.550.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	269.400.000,00	269.400.000,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	269.400.000,00	269.400.000,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	269.400.000,00	269.400.000,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.270.577.801,00	68.132.335.179,00	15.861.757.378,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.760.212.638,00	51.025.486.179,00	19.265.273.541,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	30.154.467.590,00	49.875.524.629,00	19.721.057.039,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	20.051.740.070,00	42.039.880.584,00	21.988.140.514,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	10.102.727.520,00	7.835.644.045,00	-2.267.083.475,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.605.745.048,00	1.149.961.550,00	-455.783.498,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.605.745.048,00	1.149.961.550,00	-455.783.498,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.750.877.000,00	15.755.179.000,00	10.004.302.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	10.282.439.000,00	10.282.439.000,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	10.282.439.000,00	10.282.439.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.750.877.000,00	5.472.740.000,00	-278.137.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.750.877.000,00	5.472.740.000,00	-278.137.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.759.488.163,00	1.351.670.000,00	-13.407.818.163,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.163.600.000,00	1.168.370.000,00	4.770.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.163.600.000,00	1.168.370.000,00	4.770.000,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	13.595.888.163,00	183.300.000,00	-13.412.588.163,00
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	13.595.888.163,00	183.300.000,00	-13.412.588.163,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.659.176.000,00	766.717.400,00	-1.892.458.600,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	667.060.000,00	244.000.000,00	-423.060.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	667.060.000,00	244.000.000,00	-423.060.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	667.060.000,00	244.000.000,00	-423.060.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	368.000.000,00	522.717.400,00	154.717.400,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	368.000.000,00	522.717.400,00	154.717.400,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	368.000.000,00	522.717.400,00	154.717.400,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.624.116.000,00	0,00	-1.624.116.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.624.116.000,00	0,00	-1.624.116.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.624.116.000,00	0,00	-1.624.116.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	157.263.000,00	552.300.000,00	395.037.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	402.300.000,00	402.300.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	402.300.000,00	402.300.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	402.300.000,00	402.300.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	157.263.000,00	150.000.000,00	-7.263.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	157.263.000,00	150.000.000,00	-7.263.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	157.263.000,00	150.000.000,00	-7.263.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.664.214.938,00</b>	<b>2.551.590.809,14</b>	<b>-3.112.624.128,86</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00	2.551.590.809,14	-3.112.624.128,86
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00	2.551.590.809,14	-3.112.624.128,86

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00	2.551.590.809,14	-3.112.624.128,86
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.664.214.938,00	2.551.590.809,14	-3.112.624.128,86
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>96.101.451.136,00</b>	<b>96.394.979.370,00</b>	<b>293.528.234,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.605.681.536,00	1.756.643.649,00	150.962.113,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	671.281.375,00	813.096.488,00	141.815.113,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	671.281.375,00	813.096.488,00	141.815.113,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	671.281.375,00	813.096.488,00	141.815.113,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	934.400.161,00	943.547.161,00	9.147.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	934.400.161,00	943.547.161,00	9.147.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	934.400.161,00	943.547.161,00	9.147.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.495.769.600,00	94.638.335.721,00	142.566.121,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.495.769.600,00	94.638.335.721,00	142.566.121,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.495.769.600,00	94.638.335.721,00	142.566.121,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.390.003.000,00	43.532.569.121,00	142.566.121,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	51.105.766.600,00	51.105.766.600,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>834.763.755.611,00</b>	<b>861.084.199.729,00</b>	<b>26.320.444.118,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-46.162.066.962,00</b>	<b>-37.931.435.546,00</b>	<b>8.230.631.416,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.162.066.962,00</b>	<b>39.931.435.546,00</b>	<b>-8.230.631.416,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.162.066.962,00	39.931.435.546,00	-8.230.631.416,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48.162.066.962,00	39.931.435.546,00	-8.230.631.416,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.162.066.962,00	39.931.435.546,00	-8.230.631.416,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48.162.066.962,00	39.931.435.546,00	-8.230.631.416,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.162.066.962,00</b>	<b>39.931.435.546,00</b>	<b>-8.230.631.416,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>46.162.066.962,00</b>	<b>37.931.435.546,00</b>	<b>-8.230.631.416,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kab. Kayong Utara, 16 Oktober 2024

Pj Bupati

TTD

ALFIAN